

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG**

Rizaldi Achmad Yusuf¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Nazaki³
rizaldiahmad89@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The Government of Indonesia in 2007 has issued a Family of Hope Program (PKH) which is also known internationally as Conditional Cash Transfers (CCT) or which means conditional cash assistance. PKH program is a social protection program that provides cash assistance to the poor where they are also required to implement the terms and conditions that have been set before. In this program, in the short term can reduce the burden of poor households and in the long run can break the chain of poverty between generations. The program also supports millennium development goals (MDG's) as well as developing policies in the field of social protection. The five components of MDG's assisted by PKH are: Reduction of poor and starving population, basic education, gender equality, reduction of infant mortality and reduction of maternal mortality.

Keywords: Evaluation, Program, Poor.

I. Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara – negara berkembang, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Melalui Program PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Tabel 1.

Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Rumah tangga Miskin
1	Bukit Bestari	2264 Jiwa
2	Tanjungpinang Timur	3824 Jiwa
3	Tanjungpinang Kota	1665 Jiwa
4	Tanjungpinang Barat	2443 Jawa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2019

Berdasarkan hasil data rekapitulasi penerima program PKH dalam 3 tahun yaitu dari tahun 2018 – 2020 terakhir mengalami kenaikan yang signifikan secara terus menerus di kota Tanjungpinang, hasil data rekapitulasi penerima program PKH dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Data penerima Program Keluarga Harapan dari tahun 2018 – 2020 di Kota Tanjungpinang

Ribu Jiwa				
Tahun	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
2018	2104	5518	5503	5326
2019	5297	5281	5258	5044
2020	4963	4959	5174	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, 2020

Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki tingkat Pendidikan dan Kesehatan yang cukup memadai jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, Kondisi kualitas kesehatan di kecamatan Tanjungpinang Timur termasuk yang baik jika mengacu pada data-data statistik berikut ini, dimana serana serta fasilitas Kesehatan di kecamatan Tanjungpinang Timur pada tahun 2019 tercatat terdapat 3 Puskesmas, 5 Puskesmas Pembantu, 16 Apotek, 8 Klinik/Balai Kesehatan, 22 Praktek Bidan, 46 Posyandu. Tenaga medis yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur juga dapat dibilang cukup baik diman terdapat 35 Dokter, Perawat 210 orang, Bidan 43 orang, Farmasi 18 orang dan ahli gizi 7 orang, serta jumlah penduduk yang harus dilayani untuk mendapatkan akses kesehatan ialah sebanyak 94,270 orang.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data Nasution dalam Sugiyono (2016:228) mengungkapkan bahwa dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Melalui observasi juga dapat diperoleh kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian
Informan yang akan diwawancarai

No	Informan	Jumlah Orang
1.	Koordinator PKH Kota Tanjungpinang	1 orang
2.	Pendamping PKH Kecamatan Tanjungpinang Timur	5 orang
3.	Masyarakat Penerima bantuan PKH	15 orang
	Jumlah	21 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

III. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu program, dibutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi program mempersoalkan apa yang sebenarnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau program dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa evaluasi itu akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses akhir suatu kebijakan atau seberapa jauh kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari program tersebut.

Tujuan dan sasaran dari suatu program atau kebijakan akan dapat diukur melalui evaluasi sehingga evaluasi disini sebagai tolak ukur seberapa jauh tujuan dan sasaran dari suatu program tersebut telah dicapai. Dan untuk menilai keberhasilan suatu program juga perlu dikembangkan beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada pelaksanaan PKH itu sendiri, peneliti menggunakan kriteria dari William N Dunn, adapun kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2013:610) mencakup enam kriteria yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Kriteria Evaluasi Kebijakan

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn, (2013:610)

1. Efektifitas

Efektivitas dari suatu program mengandung pertanyaan tentang apakah suatu program itu sudah mencapai hasil yang diinginkan? Efektivitas program disini sangat berkaitan erat dengan sejauh mana pelaksanaan Program PKH telah mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas Program PKH dapat dilihat dari adanya kesesuaian antar konsep dengan fakta yang ada di lapangan sehingga memungkinkan tujuan dari program keluarga harapan tersebut berjalan dengan baik.

Untuk melihat tingkat keefektifan dari Program PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur, ada dua acuan yang peneliti gunakan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan. Yang pertama adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan pengurangan angka kemiskinan dimasa yang akan datang.

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PKH.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PKH merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya suatu rancangan, dimana pihak-pihak tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam menjalankan program tersebut agar tercapai tujuan yang diinginkan. Suatu program akan terlaksana dengan baik apabila pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan menjalankan tugasnya dengan maksimal serta saling bahu membahu dalam pelaksanaan program tersebut. Apabila salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut gagal atau lambat maka program tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut.

Dari hasil penelitian, dalam pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sudah berjalan efektif, dimana elemen-elemen dalam pelaksanaan Program PKH sudah bekerja dengan baik mulai dari birokrasi terkecil di lingkungan masyarakat hingga daerah sudah berjalan dengan yang diinginkan, seperti RT/RW setempat, Kelurahan, Sekolah-sekolah, Puskesmas dan posyandu serta elemen-elemen yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan PKH.

b. Pengurangan angka kemiskinan di masa yang akan datang.

Pengurangan angka kemiskinan di masa yang akan datang merupakan tujuan utama dari program keluarga harapan itu sendiri, dimana pada program tersebut ialah untuk memutus rantai kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Tanjungpinang, yaitu Bapak M. Junaidi, cenderung Menurun dari mulai adanya Program ini di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2013. Akan tetapi berdasarkan data Dinas Sosial masih belum efektif dikarenakan masyarakat yang melakukan graduasi mandiri hanya sedikit yaitu 118 orang, oleh karena itu Para masyarakat juga diberikan Edukasi serta Pemahaman bagaimana mengelola bantuan sesuai komponen yang didapatkan agar tercapai semua tujuan awal dari program ini.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan program PKH ini mulai dari Pihak Pendidikan maupun Kesehatan di Kecamatan Tanjungpinang Timur sudah berjalan efektif hal itu ditunjukkan dengan adanya saling kerjsamanya dan koordinasi antar pihak-pihak dalam menjalankan tugasnya masing-masing demi tercapainya tujuan dari program tersebut.

Lalu dengan pengurangan angka kemiskinan di masa yang akan datang, dimana program ini masih dibilang belum efektif, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, hingga tahun 2020 masyarakat yang melakukan Graduasi Mandiri khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur baru mencapai 118 Orang (*Dinas Sosial, 2020*). Sedangkan penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang, khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur mencapai 2190 Orang, hal ini tidak berimbang dengan masyarakat-masyarakat yang keluar dari Program tersebut, dimana juga setiap tahunnya selalu ada penambahan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan tersebut. Oleh karena itu, terjadi penumpukan antara masyarakat yang ingin masuk ke dalam program bantuan dengan masyarakat yang keluar dari program tersebut.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam program ini menyangkut tentang Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program tersebut, lalu hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan Program PKH serta biaya atau estimasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

a. SDM dalam Pelaksanaan Program.

Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Program Bantuan PKH sudah dirasakan sangat mumpuni, dimana mereka direkrut secara Profesional serta melalui beberapa tahap seleksi dan juga pelatihan-pelatihan. Standart Pendamping PKH juga minimal D3, hasil temuan data Pendamping PKH khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat 10 Orang Pendamping, dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 5.

Nama-nama pendamping PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur

No	Nama	Kelurahan
1	Adi Saputra S.AP	Pinang Kencana
2	Eka Prawijayanti S.Sos	Kampung Bulang
3	Al Aminul Kahfi S.Sos	Melayu Kota Piring
4	Nelly Safrida Lubis S.Pd	Air Raja
5	Satria Oktav Rinaldi S.Ak	Batu 9
6	Widi Susanto S.Ak	Air Raja
7	Warnita M, Pd	Pinang Kencana
8	Nur Faizin S.Pd	Kampung Bulang
9	Edi Handoko S.IP	Melayu Kota Piring
10	Ade Novianti S.Pd	Batu 9

Sumber: Data Olahan, 2020

b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program.

Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan Program Bantuan PKH sering terjadi, dimana mulai dari Data, Informasi serta Masyarakat penerima sering menemui hambatan, Dinas Sosial sebagai Userdata hanya melanjutkan data ke Pusat, akan tetapi di lingkungan terkecil mulai dari RT, RW data tersebut berasal, oleh karena itu, Pendamping PKH selalu mengedukasi penting bagaimana untuk menyadarkan masyarakat yang dinilai sudah mampu dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

c. Biaya dalam pelaksanaan Program.

Berdasarkan hasil wawancara tentang biaya atau cost dalam pelaksanaan program PKH ini, sebagai Pendamping PKH, Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan proses pelaksanaan Program itu beragam, seperti Alat Tulis Kantor, Bensin Kendaraan Serta Pulsa untuk berkomunikasi dengan para masyarakat serta hal lainnya yang bersangkutan dengan proses pelaksanaan Program.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana yang menunjang kelangsungan Program PKH dinilai terbantu oleh para masyarakat penerima Program, mereka juga lebih mengerti dengan komponen yang ia peroleh agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar dari bantuan Program.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan program keluarga harapan ini berkaitan dengan sejauh mana kepuasan peserta PKH sebagai sasaran program di dalam mencukupi kebutuhannya dalam bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan. Dengan adanya PKH beberapa tujuan tersebut secara tidak langsung akan terbantu salah satunya dalam hal pengurangan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas Pendidikan, Kesetaraan Gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan. Berikut ialah skema besaran bantuan PKH di tahun 2020 sesuai Komponen penerima bantuan Program.

Tabel 6.
Besaran bantuan setiap Komponen penerima PKH tahun 2020

No	Komponen	Besaran Bantuan
1	Ibu Hamil/Nifas	3.000.000/Tahun
2	Anak usia dini 0 – 6 tahun	3.000.000/Tahun
3	SD/Sederajat	900.000/Tahun
4	SMP/Sederajat	1.500.000/Tahun
5	SMA/Sederajat	2.000.000/Tahun
6	Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000/Tahun
7	Lansia 70 Tahun ke atas	2.400.000/Tahun

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia

a. Besaran bantuan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara tentang besaran bantaun dari pemerintah pusat kepada Penerima bantuan, masyarakat dinilai masih terasa kurang, akan tetapi mereka tetap merasa senang dan terbantu dengan adanya bantuan Program PKH ini, ditambah saat bencana *Pandemic* yang melanda seluruh negara-negara termasuk Indonesia. Disimpulkan bahwa bantuan Program PKH masih dirasa kurang oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi mereka tetap bisa menerima dan mesyukuri dengan adanya bantuan program ini, setidaknya meringankan serta dapat dipergunakan sesuai dengan komponen yang didapatkan.

4. Pemerataan

Pemerataan erat kaitannya dengan rasionalitas legal dan sosial dengan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Pemerataan program PKH merupakan manfaat yang diterima oleh peserta PKH yang disalurkan secara merata. Jadi dengan kata lain, pemerataan berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat.

a. Sosialisasi menyeluruh tentang Program.

Di Kecamatan Tanjungpinang Timur, untuk pemerataan sosialisasi menurut penjelasan bapak M. Junaidi selaku Koordinator PKH Kota Tanjungpinang masih belum cukup yang dilakukan oleh pemerintah Kota, Akan tetapi Sosialisasi yang dilakukan oleh para Pendamping PKH khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik, ditambah Sosialisasi tersebut selalu dilakukan setiap bulan yaitu pada saat pertemuan kelompok-kelompok atau juga P2K2.

Disimpulkan bahwasanya Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang masih kurang, masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai Program Keluarga Harapan tersebut, pemerintah kota juga seharusnya melakukan Sosialisasi tentang program tersebut setiap tahunnya, mengingat peraturan-peraturan dari program tersebut berubah-ubah setiap tahunnya.

b. Mendata masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima program.

Mendata masyarakat yang sesuai dengan kriteria program sangatlah penting, dimana pada bagian ini merupakan bagian dimana masyarakat diterima atau tidaknya dan masuk atau tidaknya ke dalam program bantuan ini. Hal tersebut merupakan tugas dari pemerintahan kecil yang hidup di masyarakat yaitu RT dan RW, selanjutnya setelah di data oleh RT dan RW maka data tersebut akan dilanjutkan kepada Kelurahan-Kelurahan yang ada di daerah masing-masing.

Peran Dinas Sosial pada program ini sebagai Userdata atau hanya sebagai penerima Data dari bawah yang mana, data-data tersebut selanjutnya akan di serahkan kepada pemerintah di Pusat. Ketidaktahuan masyarakat juga menjadi masalah dimana pada penjelasan diatas, Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/ Kota masih dinilai kurang, perlu adanya kegiatan rutin yang harus dilakukan supaya masyarakat-masyarakat tahu dan paham adanya program bantuan ini, dan juga dari masyarakat itu sendiri yang merasa proses menjadi anggota penerima program bantuan khususnya PKH, dinilai cukup lama alurnya dan sebagian masyarakat enggan mengurus bantuan program tersebut.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa masih perlu adanya perbaikan data dari kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah-wilayah penerima program bantuan, data-data dari kelurahan tersebutlah yang akan digunakan atau akan diteruskan oleh Dinas Sosial ke pemerintah pusat untuk penerima program bantuan tersebut dan pastinya data-data yang akan diterima tentunya data-data yang memiliki komponen dari program bantuan Keluarga Harapan tersebut itu sendiri.

5. Responsivitas

Respon masyarakat di nilai baik tentang diadakannya program ini, akan tetapi diluar dari penerima program bantuan, masyarakat merasa tidak puas terhadap program tersebut. Kritik-kritik diberikan kepada para Pendamping PKH oleh masyarakat diluar dari penerima bantuan program. Disimpulkan bahwa kritik-kritik, saran serta masukan-masukan yang diberikan oleh penerima bantuan program kepada para pendamping PKH di nilai baik, kritik, saran serta masukan diterima dan ditampung oleh para pendamping yang nantinya akan disampaikan kepada Dinas yang terkait agar proses pelaksanaan program bantuan akan berjalan dengan baik kedepannya.

Sedangkan kritik dari masyarakat yang tidak menerima program bantuan tersebut juga ada, para pendamping PKH hanya bisa memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan program tersebut, agar tidak lagi timbul pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah dari masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan.

6. Ketepatan

Ketepatan erat hubungannya dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan tetapi dua atau lebih

kriteria secara bersama-sama. Ketepatan program PKH mengacu pada apakah tujuan atau nilai program dapat mengakomodir fakta program PKH di lapangan. Pada program PKH sendiri standarnya tingkat keuntungan sangat sesuai dengan nilai yang berlaku pada peserta PKH. a. Membangun Perekonomian di masyarakat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara ditanya tentang tumbuhnya ekonomi di kalangan masyarakat kecil dinilai baik dan mampu menghidupi perekonomian mereka, dimana para penerima program bantuan dinilai mampu Memanagement keuangan mereka dengan baik, salah satunya dengan membuka usaha kecil-kecilan agar perputaran uang berputar dengan baik. Dapat dilihat, bahwasanya Program bantuan Keluarga Harapan tersebut sudah baik dimana masyarakat tersebut khususnya di Kecamatan Tanjungpinang tersebut telah dapat membangun e-warung yang mana e-warung tersebut dikelola oleh masyarakat-masyarakat penerima program bantuan dan tentunya akan menghidupkan perekonomian mereka dan bantuan komponen dapat digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, terhadap Proram PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan PKH masih belum optimal itu dikarenakan angka kemiskinan masih tinggi di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang serta penerima PKH di wilayah kecamatan tersebut terus menambah, hal tersebut tidak searah dengan salah satu tujuan Program Keluarga Harapan itu langsung yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Belum Tercapainya hasil yang diinginkan dari program ini yang diukur berdasarkan kriteria evaluasi oleh Willian N Dunn, diantaranya:

1. Efektivitas

Efektivitas Program PKH dapat dilihat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang sudah baik dalam menjalankan tugasnya mulai dari ruang lingkup di masyarakat dari RT hingga ruang lingkup yang lebih besar yaitu Pemerintah Kota. Selanjutnya Penurunan angka kemiskinan di masa yang akan datang masih belum efektif, dikarenakan masyarakat yang keluar dari Program PKH atau Graduasi Mandiri hingga tahun 2020 hanya 118 orang saja tentu tidak berimbang dengan jumlah masyarakat penerima program bantuan serta setiap tahunnya terjadi penambahan penerima program.

2. Efisiensi

Dari hasil penelitian Program PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur SDM sudah sangat baik, hal tersebut dikarenakan para pelaksana program PKH sudah sangat mumpuni dengan gelar pendidikan rata-rata yaitu Strata 1 (S-1). Lalu dengan hambatan dalam pelaksanaan program masih belum berjalan dengan baik, itu dikarenakan masih terdapat data masyarakat yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan malah mendapatkan bantuan dan sebaliknya. Dan biaya dalam pelaksanaan program PKH sudah sangat baik, hal itu ditunjukkan dengan biaya bantuan yang langsung kepada penerima tidak melalui perantara siapapun.

3. Kecukupan

Dari hasil penelitian program PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur masih dirasa belum efektif, hal tersebut dikarenakan jumlah bantuan program PKH yang diterima masyarakat masih dirasakan kurang akan tetapi mereka tetap mesyukuri dengan adanya bantaun program ini.

4. Pemerataan

Hasil penelitian di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang masih belum efektif, hal itu ditandai dengan adanya pihak-pihak dalam pelaksanaan program serta masyarakat masih belum mengetahui Program PKH ini dan juga Sosilasaki yang dilakukan oleh pemerintah Kota masih dinilai kurang.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam Program PKH di Kecamatan Tanjungpinang Timur yaitu respon kepuasan mereka dengan adanya pelaksanaan Program PKH itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa peserta penerima program bantuan PKH merasa puas dengan adanya program bantuan ini. Terbukti dari hasil wawancara dengan para peserta program bantuan PKH.

6. Ketepatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, dinilai tepat dan baik dilaksanakan di wilayah ini, hal tersebut juga ditandai dengan respon baik yang dilakukan oleh masyarakat penerima program bantuan PKH disamping jumlah penduduk terpadat jika dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Tanjungpinang.

V. Daftar Pustaka

Buku

Dunn, William N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Skripsi

- Pedoman Pelaksanaan PKH 2019
- Pedoman Pelaksanaan PKH 2020
- Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020
- Kecamatan Tanjungpinang Timur Dalam Angka 2019
- Maya Dehani, dkk. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.
- Eduardus Edu, dkk. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu.
- Angelina Christine P, dkk (2018) Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
- Lejiu, Agustinus, dkk. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 4.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Fakir.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.